



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mencakup pentingnya pengendalian intern dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. SPIP dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko penyimpangan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta sinergi antara berbagai unit kerja, sehingga pengendalian intern dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPIP, mengidentifikasi kelemahan yang ada, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern di lingkungan pemerintah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki alasan yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah berjalan dengan baik dan transparan. Berikut adalah beberapa alasan utama penyusunan laporan tersebut adalah :

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi, laporan SPIP dibuat untuk memastikan adanya pengawasan terhadap proses administrasi dan keuangan negara. Sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

2. Penerapan *Good Governance*

SPIP bertujuan untuk mendukung prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah.

3. Mencegah Penyelewengan dan Penyalahgunaan Anggaran

Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi risiko penyelewengan, kebocoran anggaran, atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam tubuh pemerintahan.

4. Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Negara

Dengan adanya SPIP, pemerintah diharapkan dapat mengelola anggaran dan sumber daya negara secara efisien dan efektif. Laporan SPIP memberikan gambaran apakah sistem pengendalian yang diterapkan dalam organisasi pemerintah berjalan dengan baik atau perlu perbaikan.

5. Kewajiban Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang mencakup pengendalian atas kegiatan operasional dan pelaporan keuangan. SPIP merupakan bagian dari implementasi kewajiban ini.

6. Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah

Laporan SPIP juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah melalui perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal. Dengan adanya laporan ini, instansi pemerintah dapat menilai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disusun berdasarkan beberapa dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan dan administrasi negara serta sistem pengendalian internal di pemerintahan. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mendasari penyusunan laporan SPIP:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, yang mencakup kewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana negara. SPIP menjadi salah satu instrumen pengendalian tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang mencakup anggaran, penerimaan, dan pengeluaran negara. SPIP sebagai sistem

pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan efisien.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan ini memberikan dasar hukum yang lebih rinci mengenai pengaturan dan pelaksanaan SPIP di setiap instansi pemerintah. Di dalamnya mengatur tentang kewajiban setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan pengendalian internal.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.01/2014 tentang Pedoman Umum SPIP

Peraturan ini memberikan pedoman tentang implementasi SPIP di instansi pemerintah, termasuk tata cara penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal. Laporan SPIP juga menjadi instrumen untuk menilai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan.

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan ini menegaskan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang efektif dan melaporkan hasil pelaksanaannya. Penyusunan laporan SPIP menjadi bagian dari tanggung jawab pengelolaan pemerintahan yang baik.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Laporan SPIP juga menjadi bagian yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK mengacu pada standar pengendalian internal yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa sistem pengendalian di setiap instansi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam hal ini, peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan negara yang mencakup sistem pengendalian internal, yang berkaitan langsung dengan penyusunan laporan SPIP.

8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Internal Pemerintah

BPKP sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern pemerintah mengeluarkan peraturan ini, yang mencakup ketentuan tentang pelaporan SPIP.

1. Tujuan

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara.

1. Menilai Kualitas Pengendalian Intern

Laporan SPIP digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian intern yang ada dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan sumber daya negara.

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Laporan ini berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian yang diterapkan.

3. Memberikan Rekomendasi Perbaikan

Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang dapat mengganggu tujuan dan kinerja instansi pemerintah.

4. Menjamin Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar

Laporan SPIP bertujuan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

5. Menunjukkan Keandalan Laporan Keuangan

Dengan pengendalian intern yang baik, laporan SPIP membantu menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah andal, akurat, dan bebas dari manipulasi atau kesalahan material.

6. Meningkatkan Efektivitas Operasional

Dengan adanya evaluasi terhadap SPIP, laporan ini juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

7. Sebagai Alat Evaluasi Bagi Pimpinan

Laporan ini digunakan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian yang diterapkan serta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

8. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Dengan adanya laporan yang sistematis dan terperinci mengenai penyelenggaraan SPIP, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan SPIP akan menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas dan tidak ada penyalahgunaan sumber daya.

9. Meminimalkan Risiko Penyimpangan dan Penyalahgunaan

Salah satu tujuan utama SPIP adalah untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan, penyelewengan, atau penyalahgunaan anggaran dan sumber daya negara. Laporan SPIP memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka mitigasi risiko tersebut, serta mengevaluasi apakah langkah-langkah tersebut efektif.

10. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat

Laporan ini memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal. Informasi yang terdapat dalam laporan ini membantu pimpinan pemerintahan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan dan perbaikan sistem yang lebih baik.

BAB 2

2.1 Perkembangan Penyelenggaraan SPIP

Diisi dengan uraian perkembangan penyelenggaraan SPIP terkait

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	WAKTU	OUTPUT			
				INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
A	PERSIAPAN						
A.1	Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP*	Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Inspektorat Bawaslu RI telah menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pelaksanaan Penilaian dan Penyusunan SPIP dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 13 November 2025	Bawaslu Karanganyar melakukan persiapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi pembentukan satgas penyelenggaraan SPIP, pemetaan kelemahan SPIP, penyusunan rencana SPIP, serta penguatan pemahaman SPIP.	1. Bawaslu Karanganyar memiliki satgas penyelenggaraan SPIP 2. Bawaslu Karanganyar memiliki rencana penyelenggaraan SPIP 3. Bawaslu Karanganyar paham mengenai SPIP	1. Bawaslu Karanganyar belum membentuk satgas Penyelenggaraan SPIP 2. Bawaslu Karanganyar belum menyusun rencana penyelenggaraan SPIP 3. Bawaslu Karanganyar telah melaksanakan penguatan pemahaman SPIP	25%
A.2	Penguatan Pemahaman SPIP						
A.3	Pemetaan Kelemahan SPIP						
A.4	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan/ Pengembangan SPIP*						

e. Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja	2. Bawaslu Karanganyar melakukan pembinaan SDM dengan peningkatan kapasitas SDM	atas pengelolaan sistem informasi dilaksanakan setiap harinya	5. Pelaksanaan pemisahan fungsi sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	menginventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
f. Pemisahan Fungsi			6. Pencatatan yang rutin, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)	5. Bawaslu Karanganyar telah melakukan pembagian divisi yang tersusun dalam struktur organisasi
g. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3. Bawaslu Karanganyar telah melaksanakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi seperti website utama, website PPID, serta aplikasi pendukung lainnya seperti Srikandi, Sakti, dll.	4. Pelaksanaan Pengelolaan BMN dilaksanakan setiap hari	7. Pelaksanaan pembatasan akses khusus informasi yang dikecualikan	6. Bawaslu Karanganyar telah melakukan pembukuan serta transaksi penting dalam sistem informasi pertanggungjawaban keuangan yaitu aplikasi Sakti
h. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu		5. Bawaslu Karanganyar melaksanakan pembaruan pembagain kerja pertahunnya	8. Pendokumentasian transaksi dan kejadian penting yang tepat waktu dan akuntabel melalui sistem informasi.	7. Bawaslu Karanganyar telah menyusun daftar informasi yang dikecualikan
i. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	4. Bawaslu Karanganyar melaksanakan pengendalian fisik atas aset yang diinventarisir dalam Barang Milik Negara (BMN).	6. Bawaslu Karanganyar melaksanakan pembukuan dan pelaporan SPJ melalui aplikasi Sakti		
j. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	5. Bawaslu Karanganyar telah melaksanakan pemisahan	7. Bawaslu Karanganyar menyampaikan informasi dikecualikan Ketika terdapat permohonan informasi yang berkaitan dengan informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik.		
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting				

		fungsi yaitu pembagian kerja antar divisi sesuai dengan kompetensi masing-masing SDM. 6. Bawaslu Karanganyar telah melakukan pembukuan atas transaksi dan kejadian penting sebagai bentuk pertanggungjawaan instansi (SPJ) yang dicatat pada waktu yang akurat. 7. Bawaslu Karanganyar melaksanakan pembatasan akses dengan melakukan pengecualian atas informasi-informasi tertentu yang dilarang untuk permohonan informasi berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI				
--	--	--	--	--	--	--

		8. Bawaslu Karanganyar telah melaksanakan pencatatan atas transaksi yang berbentuk SPJ dan diinput dalam aplikasi Saksi yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.					
4.)	Informasi dan Komunikasi	1. Bawaslu Karanganyar telah membangun sistem pengaduan	Sistem pengaduan telah berjalan sejak 2022 dan masih berlanjut hingga sekarang	1. Sistem pengaduan telah dibuat dan dipublikasikan ke masyarakat	1. Sistem pengaduan dapat berjalan optimal	Bawaslu Karanganyar telah menyusun register risiko dan manajemen risiko	50%
	a. Informasi	2. Register risiko, manajemen risiko, dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait		2. Rencana tindak lanjut risiko sudah tersusun dan dijalankan.	2. Rencana tindak lanjut risiko dapat terlaksana		
	b. Komunikasi yang Efektif						
5.)	Pemantauan	1. Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam	Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan setiap pasca pelaksanaan kegiatan telah selesai	1. Evaluasi program kegiatan terlaksana secara rutin	1. Bawaslu Karanganyar melakukan evaluasi program kerja secara berkala	1. Bawaslu Karanganyar telah melaksanakan evaluasi program kerja secara berkala setiap selesai kegiatan	50%
	a. Pemantauan Berkelanjutan			2. Pemantauan manajemen risiko secara berkala	2. Reviu manajemen risiko Bawaslu Karanganyar terlaksana dengan lancar	2. Reviu manajemen risiko di Bawaslu Karanganyar masih belum rutin terlaksana setiap tahunnya	
	b. Evaluasi Terpisah						
	c. Tindak lanjut						

		rangka mencapai tujuan organisasi. 2. Proses manajemen risiko telah direviu					
B.2.	INTERNALISASI/ SOSIALIASI INFRASTRUKTUR						
B.3.	PENERAPAN INFRASTRUKTUR						
B.4.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN INFRASTRUKTUR						
B.5.	PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN/ PENYEMPURNAAN INFRASTRUKTUR						
C	PELAPORAN						

C.1.	PELAPORAN TAHUNAN	Penyusunan Laporan Tahunan SPIP Terintegrasi pada instansi Bawaslu Karanganyar	Penyusunan Laporan Tahunan SPIP Terintegrasi tiap tahun	Penyusunan Laporan SPIP secara konsisten tiap tahun	Bawaslu Karanganyar membuat laporan SPIP secara rutin tiap tahun	Bawaslu Karanganyar belum menyusun laporan SPIP terintegrasi tiap tahun	25%

D. Hambatan dalam Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari faktor internal (dalam instansi pemerintah itu sendiri) maupun faktor eksternal (dari lingkungan sekitar atau kebijakan yang lebih luas). Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam penyelenggaraan SPIP:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengendalian internal. Pemerintah membutuhkan pegawai yang terlatih untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip SPIP secara efektif. Tanpa SDM yang terlatih, implementasi SPIP bisa kurang optimal.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Banyak instansi pemerintah yang sudah memiliki cara kerja dan prosedur yang telah lama berjalan. Penerapan SPIP yang baru atau perubahan prosedur dalam rangka pengendalian internal seringkali menghadapi resistensi dari pegawai atau pimpinan yang merasa nyaman dengan cara lama. Resistensi ini dapat memperlambat atau menghambat penerapan sistem pengendalian yang efektif.

3. Kurangnya Dukungan dari Pimpinan

Keberhasilan implementasi SPIP sangat bergantung pada komitmen dan dukungan dari pimpinan tertinggi di masing-masing instansi. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, penerapan SPIP dapat terhambat, karena pengendalian internal membutuhkan kebijakan, sumber daya, serta perhatian yang serius dari pimpinan.

4. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan sistem pengendalian internal juga menjadi hambatan. Implementasi SPIP memerlukan dana untuk pelatihan, pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan, serta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Jika anggaran terbatas, hal ini akan mengurangi efektivitas implementasi SPIP.

5. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai

SPIP sering kali membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen yang dapat mengintegrasikan berbagai data pengendalian internal. Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi atau sistem informasi yang kurang memadai dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk mengelola pengendalian internal secara efisien.

6. Kompleksitas Prosedur dan Regulasi

Prosedur dan regulasi yang terlalu rumit atau tidak jelas bisa menjadi hambatan dalam implementasi SPIP. Jika sistem pengendalian internal dianggap terlalu birokratis atau kompleks, maka pegawai di lapangan bisa kesulitan dalam mengikuti prosedur tersebut, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pengendalian internal.

7. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP yang tidak berjalan secara teratur dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pengendalian internal. Tanpa evaluasi berkala, potensi masalah dalam sistem pengendalian tidak akan terdeteksi dengan cepat, sehingga bisa mengarah pada penyalahgunaan atau ketidakefisienan.

8. Ketergantungan pada Sistem Manual

Beberapa instansi pemerintahan masih bergantung pada sistem manual untuk pengelolaan data dan pelaporan, yang rentan terhadap kesalahan manusia dan penyelewengan. Ketergantungan pada sistem manual ini bisa memperlambat proses pengendalian dan pemantauan, serta meningkatkan risiko ketidakakuratan data.

9. Faktor Budaya Organisasi

Budaya organisasi di beberapa instansi pemerintahan mungkin kurang mendukung penerapan pengendalian internal yang ketat. Misalnya, dalam beberapa kasus, mungkin ada budaya toleransi terhadap pelanggaran kecil atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat menghambat penerapan SPIP secara efektif, karena pengendalian internal memerlukan perubahan mendasar dalam cara kerja dan mindset.

10. Beban Kerja yang Tinggi

Pegawai pemerintah seringkali dihadapkan pada beban kerja yang tinggi dengan keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-

tugas pengendalian internal. Beban kerja yang berlebihan dapat mengurangi fokus pada pelaksanaan SPIP, sehingga pengendalian internal tidak dapat dijalankan secara maksimal.

11. Keterbatasan dalam Penyediaan Data yang Akurat dan Tepat Waktu

Untuk melaksanakan pengendalian internal yang efektif, data yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan. Namun, di beberapa instansi pemerintah, pengumpulan data yang konsisten dan sistematis masih menjadi tantangan. Jika data yang diperlukan untuk evaluasi SPIP tidak tersedia atau tidak tepat, maka pengendalian internal akan kurang efektif.

12. Perbedaan Pemahaman antara Instansi Pemerintah

Masing-masing instansi pemerintahan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan implementasi SPIP. Perbedaan ini bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antar instansi atau daerah, sehingga dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan.

13. Keterbatasan Koordinasi antar Instansi

Implementasi SPIP memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat. Tanpa koordinasi yang efektif, pelaksanaan SPIP di setiap unit kerja bisa terfragmentasi, dan hal ini dapat menghambat pengendalian internal yang komprehensif.

E. Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta sumber daya negara. Untuk memastikan SPIP dapat diterapkan dengan efektif di setiap instansi pemerintah, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang bersifat berkelanjutan. Rencana tindak lanjut yang matang dan terstruktur akan memperkuat implementasi SPIP dan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan.

Berikut adalah rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan SPIP di instansi pemerintah:

1. Pelatihan Berkelanjutan Mengenai Peningkatan Pemahaman Tentang SPIP

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi SPIP adalah kurangnya

pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya sistem pengendalian intern di kalangan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat pelatihan dan sosialisasi terkait SPIP. Pelatihan yang menyeluruh harus dilakukan secara berkala, baik untuk tingkat pimpinan maupun seluruh pegawai di setiap unit kerja. Pelatihan bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa pengawasan dan partisipasi publik dalam pengendalian intern adalah bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam Pengendalian Intern

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan SPIP adalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Instansi pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pegawai, terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan, memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pengendalian intern.

Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis yang lebih mendalam mengenai SPIP dan audit internal. Sertifikasi bagi auditor internal yang berkompeten juga harus diprioritaskan, sehingga mereka bisa menjalankan tugas pengawasan dengan efektif.

Selain itu, penyusunan program pengembangan karir yang fokus pada peningkatan keterampilan di bidang pengendalian intern dapat membantu menciptakan kader-kader pengelola SPIP yang handal di masa depan.

3. Perbaikan Infrastruktur dan Sistem Informasi

Untuk mendukung implementasi SPIP yang efektif, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, terutama dalam hal sistem informasi manajemen keuangan. Banyak instansi pemerintah yang masih menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan baik.

Oleh karena itu, penting untuk memperbarui dan mengintegrasikan sistem informasi keuangan yang ada, agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran bisa dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Penggunaan sistem informasi yang lebih terstruktur dan terhubung akan memudahkan pemantauan pengelolaan anggaran di seluruh instansi pemerintah secara lebih sistematis.

Modernisasi infrastruktur teknologi informasi juga akan membantu meningkatkan ketepatan dan akurasi data yang digunakan dalam proses

pengendalian intern.

4. Penguatan Komitmen Pimpinan Dalam Implementasi SPIP

Keberhasilan implementasi SPIP sangat bergantung pada dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan di setiap tingkatan instansi pemerintah. Pimpinan harus memberikan teladan yang baik dalam penerapan prinsip pengendalian intern, baik dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan kebijakan, maupun pengawasan internal.

Dalam hal ini, pimpinan perlu menetapkan kebijakan yang tegas terkait pelaksanaan SPIP dan menekankan pentingnya pengendalian intern untuk mencegah potensi penyimpangan. Pimpinan juga harus memastikan bahwa semua pejabat struktural di bawahnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem pengendalian intern ini.

Untuk itu, pimpinan harus mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun waktu, untuk memastikan SPIP dapat diterapkan dengan baik. Pimpinan juga perlu memantau dan mengevaluasi secara rutin hasil pelaksanaan SPIP di bawah tanggung jawab mereka.

5. Penguatan Sistem Pengendalian dan Monitoring

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk memperkuat pengendalian intern. Sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat membantu mempercepat pemantauan, pengawasan, serta pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, instansi pemerintah harus segera mengembangkan dan mengintegrasikan sistem manajemen keuangan dan pengendalian yang berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan pengawasan secara *real-time* sangat penting untuk memantau dan mendeteksi potensi penyimpangan dengan lebih cepat dan efisien.

Monitoring yang berbasis teknologi juga akan memudahkan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan atau proyek yang sedang berjalan. Instansi pemerintah perlu memanfaatkan data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih dini.

6. Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit

Salah satu elemen kunci dalam SPIP adalah pengawasan internal yang

dilakukan oleh unit audit internal. Agar audit internal dapat berjalan efektif, maka perlu ada penguatan terhadap unit audit tersebut, baik dari segi kapasitas SDM maupun dukungan teknologi.

Instansi pemerintah harus memastikan bahwa unit audit internal memiliki akses penuh terhadap seluruh data dan informasi yang relevan untuk pengawasan keuangan dan operasional. Audit internal juga harus diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran, proyek, dan kebijakan yang ada.

Selain itu, audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga perlu dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa pengendalian intern berjalan dengan baik.

Tindak lanjut terhadap temuan audit harus dilakukan secara serius dan segera, dengan mengidentifikasi penyebab masalah dan merancang langkah-langkah perbaikan yang konkret.

7. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Rencana tindak lanjut juga mencakup penyusunan dan penyempurnaan kebijakan yang mendukung penerapan SPIP. Kebijakan ini harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Selain itu, regulasi yang ada perlu diselaraskan agar tidak ada tumpang tindih atau kebingungan dalam penerapan SPIP. Pembentukan kebijakan yang jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat akan mempermudah pelaksanaan pengendalian intern.

BAB 3

PENUTUP

A. Rekomendasi dan Saran

Rekomendasi dan Saran untuk penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada serta memperkuat implementasi pengendalian internal di instansi pemerintah. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, diharapkan SPIP dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung akuntabilitas dan transparansi, serta mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

1. Monitoring dan Review Berkala

Rekomendasi : Lakukan pemantauan dan evaluasi SPIP secara berkala untuk memastikan pengendalian internal terus berfungsi dengan baik. Ini termasuk peninjauan terhadap perubahan regulasi atau kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi SPIP.

Alasan : Pelaksanaan SPIP perlu dipantau secara rutin oleh agar tujuan pembuatan kebijakan atas implementasi SPIP dapat tercapai.

2. Dokumentasi dan Pelaporan

Rekomendasi : Pendokumentasian pelaporan SPIP harus jelas, terstruktur, dan mudah dipahami sebagai bagian dari pengendalian internal instansi.

Alasan : Pelaporan SPIP yang didokumentasikan secara baik akan mempermudah dalam evaluasi SPIP.

3. Penyederhanaan Prosedur dan Standar Operasional

Rekomendasi: Menyederhanakan prosedur pengendalian internal yang terlalu birokratis dan rumit, serta menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Alasan: Prosedur yang rumit dapat menghambat efektivitas implementasi SPIP. SOP yang jelas akan memudahkan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pengendalian internal.

4. Penekanan pada Pengelolaan Risiko secara Komprehensif

Rekomendasi: Menyusun dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif di seluruh instansi pemerintah, dengan fokus

pada identifikasi dan mitigasi risiko yang berpotensi mengganggu tujuan dan pengendalian internal.

Alasan: Pengelolaan risiko yang baik adalah salah satu aspek penting dalam SPIP yang dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kegagalan dalam pelaksanaan program.

5. Peningkatan Kolaborasi Antar Unit Kerja

Rekomendasi : Meningkatkan koordinasi antar unit dan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga pengawas eksternal, untuk saling bertukar informasi dan pengalaman guna meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Alasan : Agar pengendalian internal tidak hanya dilaksanakan secara terpisah di setiap unit, tetapi juga saling mendukung dan berkolaborasi demi tujuan bersama.

B. Saran untuk Penyelenggaraan SPIP

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko yang Jelas

Saran: Laporan SPIP sebaiknya tidak hanya menjelaskan tentang pengendalian internal, tetapi juga memberikan gambaran tentang risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko harus diidentifikasi dan dievaluasi dengan jelas.

2. Fokus pada Penyelesaian Masalah dan Pengambilan Tindakan

Saran: Jangan hanya menyoroti kelemahan dalam sistem pengendalian internal, tetapi juga berikan solusi atau rekomendasi konkrit untuk mengatasi masalah yang ditemukan.

3. Keterlibatan Semua Pihak yang Terlibat

Saran: Pastikan laporan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan pengawasan.

4. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Laporan harus menunjukkan bahwa evaluasi terhadap efektivitas SPIP dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Juga, penting untuk menjelaskan bagaimana temuan-temuan sebelumnya ditindaklanjuti untuk memastikan perbaikan.

5. Mempercepat Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengendalian

Internal

Saran: Mempercepat digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengendalian internal, seperti penggunaan perangkat lunak manajemen risiko, sistem audit berbasis teknologi, dan aplikasi pelaporan elektronik.

6. Memperkuat Kolaborasi dengan Lembaga Pengawasan

Saran: Instansi pemerintah dapat bekerja sama lebih erat dengan lembaga pengawasan seperti BPK dan BPKP dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pengendalian internal yang dapat diimplementasikan secara lebih efektif.